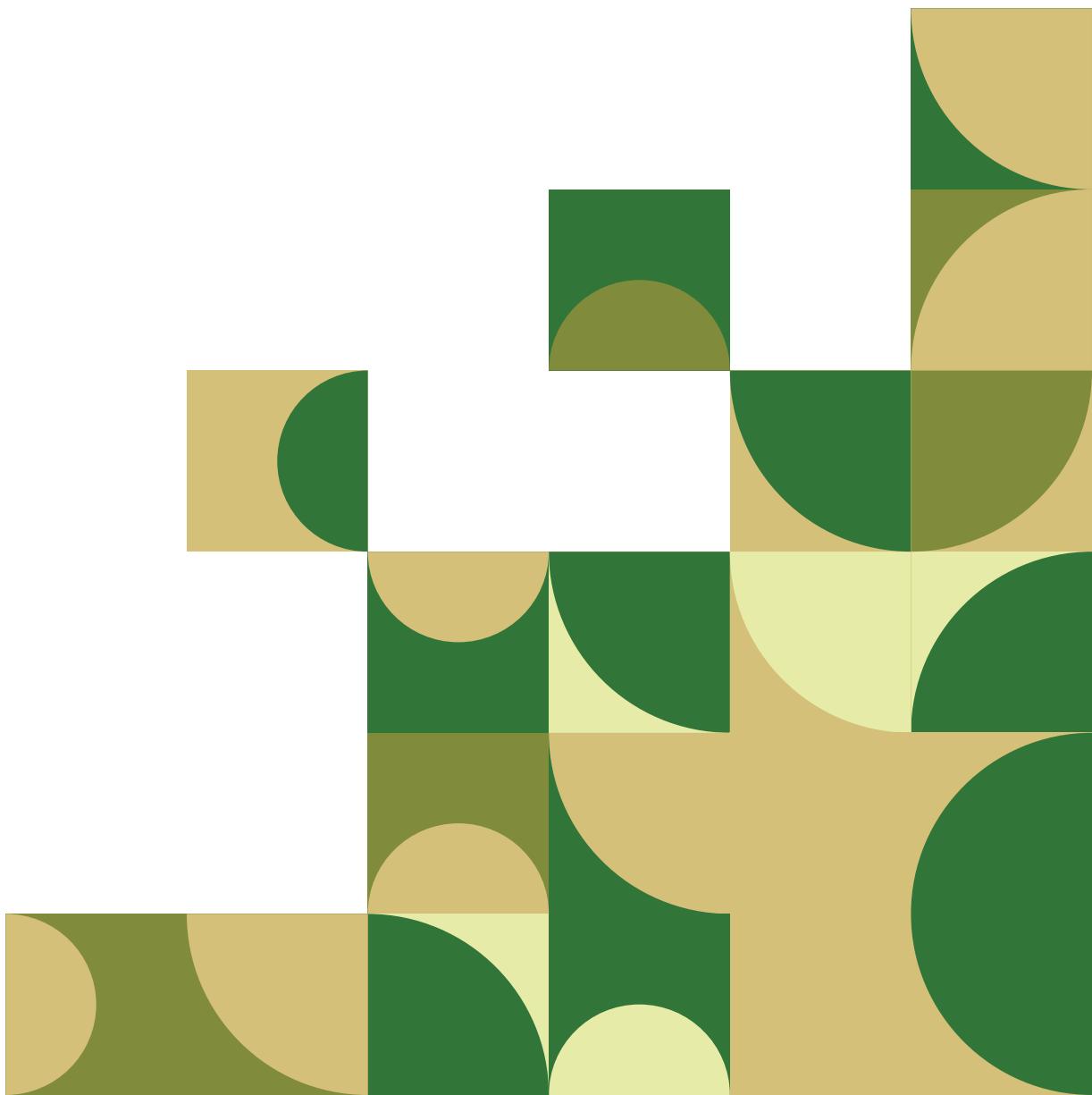


POLICY BRIEF

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI SEKTOR PERTANIAN

Martha Ranggi Primanthy, Rumayya, Shochrul Rohmatul Ajija,
Muhammad Syaikh Rohman

Collaboration between INKLUSI and BKMP UNAIR in 2024



Penafian

Risalah kebijakan merupakan hasil penelitian "Pemberdayaan Perempuan di Sektor Pertanian" yang telah disusun dan dicetak oleh Badan Kerja Sama dan Manajemen Pengembangan (BKMP) Universitas Airlangga, bekerja sama dengan 'Aisyiyah dengan dukungan dari Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). INKLUSI berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Acknowledgement.

Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu upaya dalam menghadapi permasalahan kesetaraan gender yang mengakar kuat di sektor pertanian. Studi mengenai pemberdayaan perempuan di sektor pertanian ini berhasil mengungkap kontribusi perempuan di sektor pertanian serta mengevaluasi tantangan yang mereka hadapi (baik dari segi ekonomi maupun non-ekonomi). Selanjutnya, dari aspek-aspek yang telah terungkap dan dengan dukungan serta umpan balik para *stakeholder*, tersusunlah *Policy Brief* Pemberdayaan Perempuan di Sektor Pertanian ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) yang telah memberikan dukungan pendanaan serta fasilitas dalam pelaksanaan penelitian ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI yang telah memberikan berbagai masukan dalam proses penyusunan rekomendasi ini. Tidak lupa, apresiasi setinggi-tingginya kami nyatakan kepada mitra *civil society organization* (CSO) kami, yakni Pimpinan Pusat maupun Daerah 'Aisyiyah yang telah bersama-sama kami sejak proses awal hingga terselesaikannya penelitian ini. Terakhir, ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada para Dosen bidang Ilmu Ekonomi Pertanian serta Sosiologi dan Gender Universitas Airlangga yang telah memberikan *input* dan masukan untuk perbaikan penelitian. Tanpa dukungan dari semua pihak, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang nantinya, diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan produktivitas di sektor pertanian. Dengan demikian, kinerja sektor pertanian dapat terus meningkat, dengan memastikan tidak ada seorangpun yang tertinggal.

Executive Summary

Sektor pertanian menyumbang 11,8% dari PDB nasional pada Triwulan I 2023 dan merupakan sumber penghidupan utama di pedesaan. Meskipun demikian, produktivitas sektor ini masih rendah, dan ketergantungan masyarakat pedesaan pada pertanian memperburuk kemiskinan di daerah-daerah tersebut. Perempuan memiliki peran penting dalam pertanian, tetapi keterbatasan akses mereka terhadap lahan, teknologi, dan sumber daya menghambat produktivitas. Pemberdayaan dapat mengatasi hambatan ini dan memungkinkan mereka berkontribusi lebih besar dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas.

Penelitian ini, yang merupakan bagian dari program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif), dilakukan sebagai kolaborasi antara Universitas Airlangga (UNAIR) dan Aisyiyah. Studi ini dilaksanakan di empat kabupaten: Probolinggo (Jawa Timur), Garut (Jawa Barat), Kolaka (Sulawesi Tenggara), dan Lahat (Sumatera Selatan). Metode yang digunakan meliputi survei kuantitatif dengan 1.400 responden perempuan petani serta Focus Group Discussions (FGD) dengan pemerintah daerah dan perwakilan perempuan petani di masing-masing kabupaten. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kontribusi perempuan di sektor pertanian, mengevaluasi tantangan yang mereka hadapi, baik

dari segi ekonomi maupun non-ekonomi, dan menyusun rekomendasi kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas mereka di sektor pertanian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 16% perempuan petani yang tergolong berdaya, sementara 84% masih mengalami ketidakberdayaan, terutama dalam aspek akses kredit, pengambilan keputusan produktif, dan keterampilan berbicara di depan umum. Faktor-faktor penentu pemberdayaan meliputi keikutsertaan dalam organisasi masyarakat, tingkat pendidikan, usia, status pekerjaan, dan kepemilikan rumah.

Untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di sektor pertanian, direkomendasikan beberapa kebijakan strategis, termasuk peningkatan nilai tambah produk pertanian, perluasan akses pemasaran digital, penyediaan akses kredit khusus perempuan, pelatihan perencanaan keuangan, serta peningkatan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian, mengurangi kemiskinan pedesaan, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



I. Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional Indonesia. Dengan kontribusi sebesar 11,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Triwulan I 2023, pertanian tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar masyarakat pedesaan, tetapi juga menunjukkan ketahanan yang tinggi selama pandemi Covid-19. Pembebasan aliran rantai pasok produk pertanian dari Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) memungkinkan sektor ini tetap beroperasi dan bahkan mengalami pertumbuhan positif.

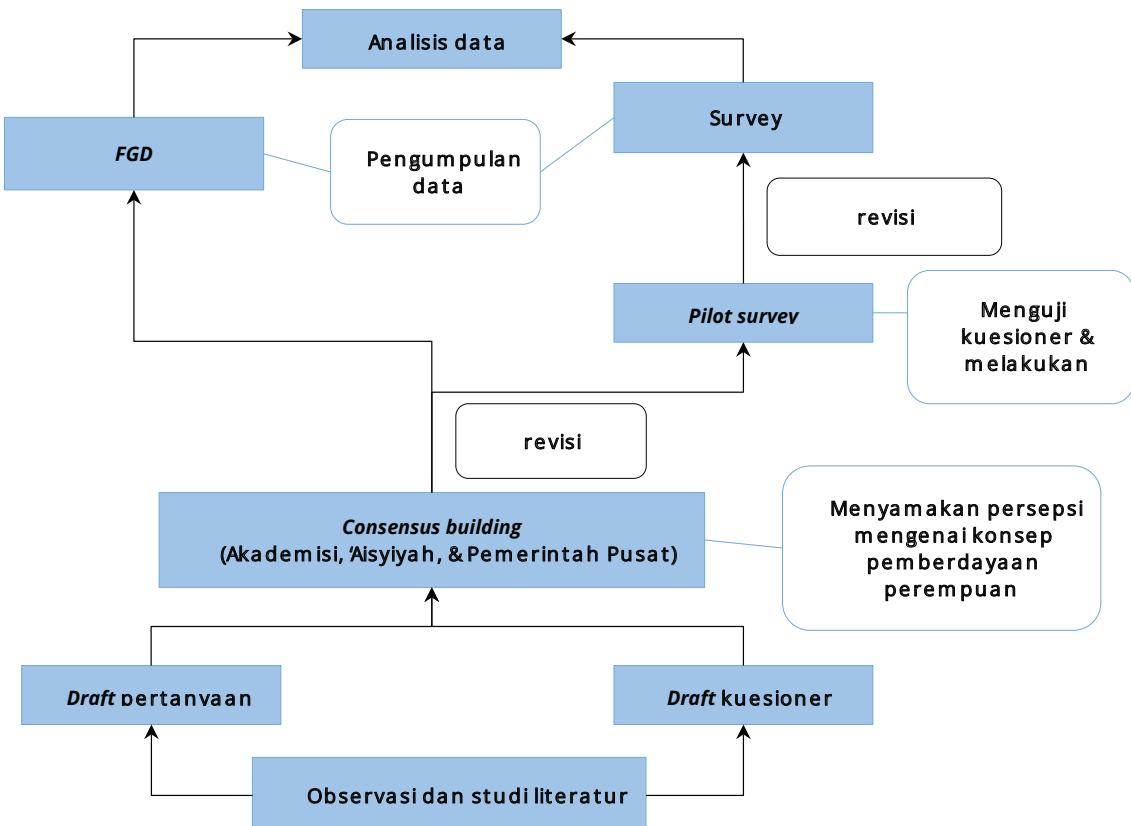
Namun, sektor pertanian Indonesia menghadapi tantangan serius dalam hal produktivitas. Dari tahun 2018 hingga 2022, produktivitas stagnan di kisaran Rp35-38 juta per pekerja per tahun—angka yang terendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Rendahnya produktivitas ini berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan di pedesaan, yang mencapai 12,22% pada Maret 2023, jauh lebih tinggi dibandingkan 7,29% di perkotaan. Ketergantungan masyarakat pedesaan pada sektor pertanian, bersama dengan rendahnya pendapatan per kapita, semakin memperburuk kondisi ekonomi dan sosial di daerah-daerah tersebut.

Pemberdayaan perempuan dalam sektor pertanian menjadi salah satu solusi potensial untuk mengatasi masalah ini. Perempuan memainkan peran besar dalam berbagai taha-

pan pertanian, baik dalam produksi maupun pengolahan hasil panen. Namun, tanpa pemberdayaan, mereka sering kali terhambat oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya seperti lahan dan teknologi, keterlibatan yang terbatas dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya pelatihan untuk meningkatkan produktivitas. Dengan memberdayakan perempuan, mereka dapat memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya pertanian dan teknologi, serta lebih aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, yang secara langsung dapat mendorong peningkatan produktivitas.

Penelitian ini merupakan bagian dari program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif), yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia. Kolaborasi antara tim peneliti dari Universitas Airlangga (UNAIR) dan Aisyiyah dilakukan untuk menganalisis kontribusi perempuan dalam sektor pertanian, memahami lebih dalam tantangan yang mereka hadapi di empat kabupaten—Probolinggo (Jawa Timur), Garut (Jawa Barat), Kolaka (Sulawesi Tenggara), dan Lahat (Sumatera Selatan)—serta mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan mereka. Metode penelitian meliputi survei kuantitatif dengan 1.400 responden perempuan petani dan Focus Group Discussions (FGD) dengan pemerintah daerah serta perwakilan perempuan petani di masing-masing kabupaten.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi permasalahan yang mereka hadapi dan memberikan rekomendasi kebijakan pemberdayaan yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas perempuan di sektor pertanian.



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

II. Kondisi Perempuan di Sektor Pertanian

Perempuan memainkan peran penting dalam sektor pertanian di Indonesia. Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa perempuan hanya mencakup 14%

dari total pekerja di sektor ini. Namun, temuan penelitian kami menunjukkan bahwa kontribusi perempuan sebenarnya jauh lebih besar. Banyak perempuan petani tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai petani, melainkan sebagai ibu rumah tangga, meskipun mereka terlibat aktif dalam kegiatan pertanian sehari-hari.

Mayoritas perempuan petani (62%) yang disurvei dalam penelitian ini

mengelola lahan mereka sendiri, sementara 18,79% bekerja sebagai buruh tani. Sisanya memiliki peran ganda sebagai penggarap lahan sendiri dan buruh tani. Padi tetap menjadi komoditas utama yang mereka hasilkan, meskipun sebagian besar hanya menggarap lahan kecil, kurang dari 2500 m². Luas lahan yang terbatas ini mengakibatkan pendapatan yang dihasilkan juga rendah, karena keterbatasan kapasitas produksi.

Komitmen perempuan dalam sektor pertanian terlihat dari jumlah waktu yang mereka habiskan untuk bekerja. Berdasarkan hasil survei penelitian ini, sebanyak 41,14% perempuan petani bekerja antara 5 hingga 8 jam sehari di lahan pertanian, dan lebih dari 15% bekerja lebih dari 8 jam sehari. Namun, peran mereka tidak berhenti pada kegiatan pertanian saja. Perempuan juga menghadapi beban ganda sebagai pengurus rumah tangga, yang membuat waktu luang mereka sangat terbatas. Mereka harus mengurus rumah, mengasuh anak, dan memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi, yang meningkatkan tingkat stres dan mengorbankan kesejahteraan pribadi.

Perempuan petani juga menghadapi berbagai kendala dalam mengakses sumber daya produktif. Salah satu kendala utama adalah akses terhadap modal. Menurut survei kami, 63% perempuan petani hanya menabung di rumah, tanpa akses ke lembaga keuangan formal. Ini menghambat mereka untuk mengembangkan usaha tani, karena tanpa modal yang cukup, mereka tidak bisa

berinvestasi dalam teknologi, peralatan, atau bibit unggul untuk meningkatkan hasil panen. Akses ke layanan keuangan formal seperti kredit usaha tani atau pinjaman mikro juga masih terbatas, sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau persyaratan yang sulit dipenuhi, seperti jaminan aset yang mereka tidak miliki.

Selain modal, akses terhadap teknologi dan informasi pertanian juga menjadi tantangan utama. Teknologi pertanian modern, seperti alat irigasi otomatis, mesin pemanen, atau pupuk dan pestisida yang lebih efisien, sering kali tidak tersedia atau sulit diakses oleh perempuan. Bahkan ketika teknologi ini tersedia, sering kali mereka tidak memiliki pelatihan atau pengetahuan yang cukup untuk menggunakan secara efektif. Rendahnya akses terhadap informasi tentang teknik bertani yang lebih efisien atau praktik ramah lingkungan menghambat kemampuan perempuan untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas.

Diskriminasi dalam pengambilan keputusan juga menjadi hambatan besar bagi perempuan petani. Di banyak komunitas pedesaan, keputusan penting terkait pertanian, seperti jenis tanaman, waktu tanam dan panen, serta cara menjual hasil panen, sering kali diambil oleh laki-laki, baik di tingkat keluarga maupun komunitas. Meskipun perempuan yang mengelola lahan dan melakukan sebagian besar pekerjaan pertanian, suara mereka sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan, yang membatasi otonomi

mereka dalam mengelola lahan dan mengurangi efektivitas mereka dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Penggunaan teknologi digital di kalangan perempuan petani juga masih sangat terbatas. Berdasarkan survei kami, meskipun mayoritas perempuan petani memiliki akses ke smartphone, hanya sekitar 32% yang menggunakannya untuk mendukung usaha tani. Sebagian besar penggunaan smartphone lebih diarahkan untuk komunikasi pribadi atau media sosial, bukan untuk kegiatan usaha, seperti mencari informasi pasar atau memasarkan produk pertanian secara online. Saat ini, hanya 2% perempuan petani yang memiliki toko di platform e-commerce, menunjukkan bahwa potensi teknologi digital untuk pemasaran dan peningkatan produktivitas pertanian masih sangat kurang dimanfaatkan.

Selain itu, kurangnya pelatihan dan edukasi digital membuat perempuan petani kesulitan untuk memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Banyak yang merasa tidak percaya diri atau tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk menggunakan alat-alat digital dalam konteks usaha tani. Tanpa dukungan pelatihan yang tepat, perempuan petani akan terus tertinggal dalam memanfaatkan potensi teknologi yang bisa membantu mereka meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

III. Indeks Pemberdayaan Perempuan di Sektor Pertanian

Penelitian ini menggunakan lima dimensi utama untuk mengukur pemberdayaan perempuan di sektor pertanian:

1. Produksi: Keterlibatan dalam kegiatan pertanian sehari-hari.
2. Sumber Daya: Akses terhadap aset produktif, kredit, dan keputusan terkait penjualan aset.
3. Kontrol terhadap Pendapatan: Pengelolaan pendapatan dari hasil pertanian.
4. Kepemimpinan: Keterlibatan dalam kelompok masyarakat dan kemampuan berbicara di depan umum.
5. Alokasi Waktu: Pengelolaan waktu antara pekerjaan pertanian dan tanggung jawab rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 16% perempuan petani yang tergolong berdaya, sementara 84% lainnya masih mengalami ketidakberdayaan. Rata-rata skor ketidakberdayaan adalah 33%, yang berarti perempuan yang tidak berdaya masih tidak berdaya di 33% dari seluruh dimensi yang diukur.



Danang DKW via Pexels

Tabel 1. Indeks Pemberdayaan Perempuan di Sektor Pertanian

	All Samples	Probolinggo	Garut	Lahat	Kolaka
Perempuan berdaya (%)	16	19	16	21	21
Perempuan yang tidak berdaya (%)	84	81	84	79	79
Rata-rata skor ketidakberdayaan	0.33	0.33	0.33	0.31	0.36
Index ketidakberdayaan	0.28	0.27	0.28	0.24	0.28
Index pemberdayaan	0.72	0.73	0.72	0.76	0.72

Sumber: Perhitungan Penulis

Berikut adalah rincian aspek berdaya dan tidak berdaya yang diidentifikasi dalam penelitian ini:

Aspek Berdaya:

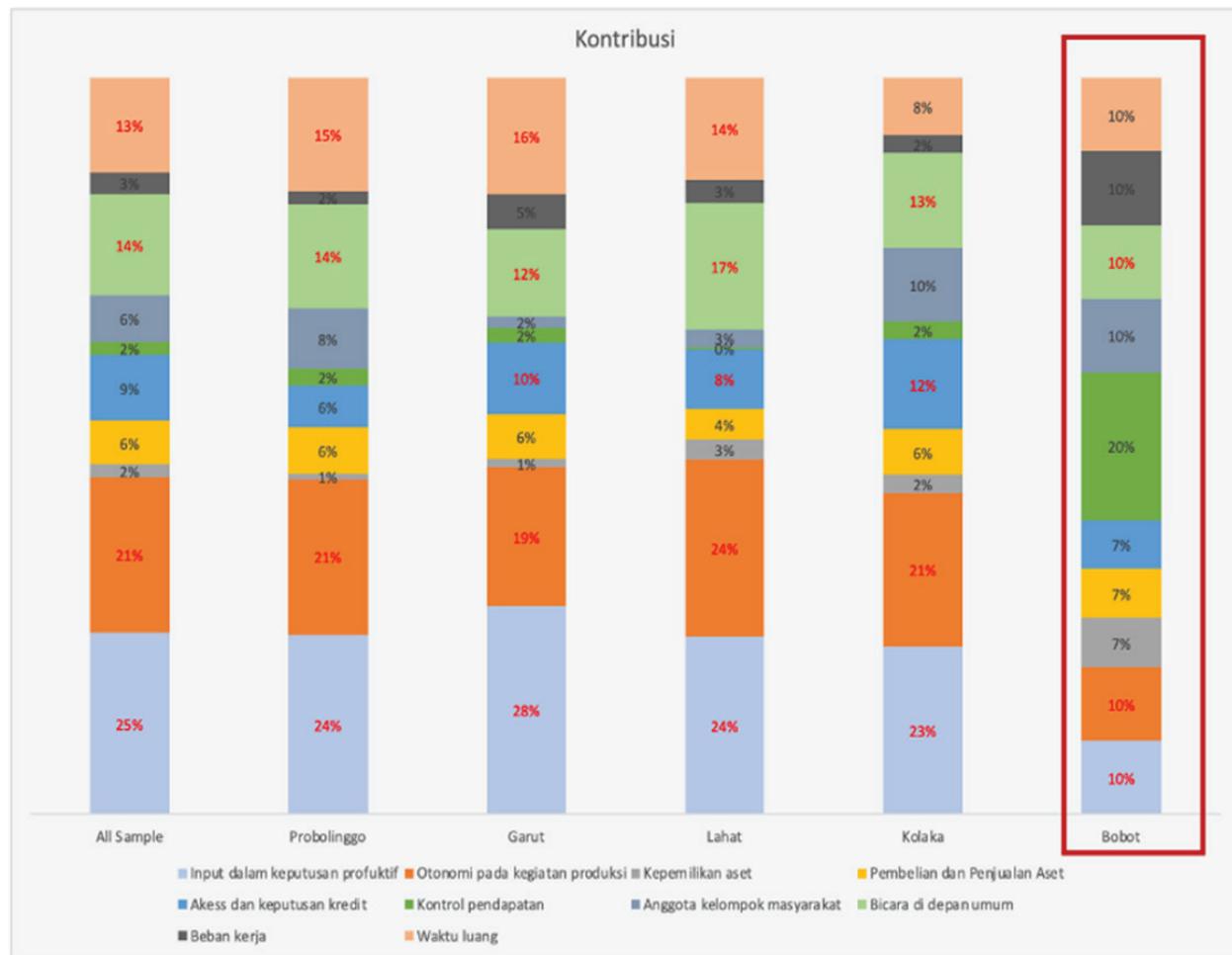
- **Kontrol terhadap Pendapatan:** Mayoritas perempuan petani mengelola pendapatan, baik pendapatan pribadi maupun pendapatan keluarga. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kontrol terhadap sumber daya ekonomi keluarga.
- **Kepemilikan Aset:** Banyak perempuan memiliki aset produktif, namun otonomi dalam pengelolaan aset ini terbatas karena keputusan biasanya diambil bersama pasangan atau keluarga besar.
- **Beban Kerja:** Perempuan merasa beban kerja mereka sudah cukup, yang dalam konteks ini menunjukkan kontrol atas beban kerja yang mereka alami.
- **Keanggotaan dalam Kelompok Masyarakat:** Banyak perempuan yang menjadi anggota kelompok masyarakat atau organisasi, yang memberikan mereka akses ke sumber daya dan informasi.

Aspek Tidak Berdaya:

- **Input dalam Keputusan Produktif:** Perempuan kurang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait input pertanian seperti pemilihan teknologi dan jenis tanaman.
- **Otonomi pada Kegiatan Produksi:** Banyak perempuan yang terlibat dalam kegiatan pertanian bukan berdasarkan motivasi pribadi, tetapi karena tradisi atau kebutuhan ekonomi keluarga.
- **Akses dan Keputusan Kredit:** Perempuan mengalami kendala dalam mengakses kredit karena memerlukan persetujuan dari suami atau pasangan.
- **Kemampuan Berbicara di Depan Umum:** Lebih dari 40% perempuan mengaku tidak nyaman berbicara di depan umum, yang menghambat partisipasi mereka dalam forum pengambilan keputusan.

- **Waktu Luang:** Beban kerja ganda sebagai petani dan pengurus rumah tangga membatasi waktu luang mereka, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mereka.

Gambar 1. Kontribusi Setiap Komponen dan Bobot pada Indeks



*Keterangan: Jika nilai proporsi melebihi bobot ideal maka indikator menjadi faktor ketidakberdayaan bagi petani perempuan.

IV. Faktor Penentu Pemberdayaan Perempuan di Sektor Pertanian

Penelitian ini mengidentifikasi dua kelompok utama faktor yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan di sektor pertanian: karakter individu dan karakter rumah tangga.

1. Karakter Individu

- **Keikutsertaan dalam Organisasi Masyarakat:** Perempuan yang aktif dalam organisasi seperti Aisyiyah memiliki tingkat pemberdayaan yang lebih tinggi. Keikutsertaan ini memberikan mereka akses ke informasi, pelatihan, dan jaringan sosial yang

dapat mendukung peningkatan keterampilan dan akses ke sumber daya.

- **Pendidikan:** Tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan. Perempuan dengan pendidikan setingkat SMA atau lebih tinggi memiliki indeks ketidakberdayaan yang lebih rendah. Pendidikan tinggi, seperti Diploma atau lebih, sangat meningkatkan kemampuan mereka dalam sektor pertanian.
- **Usia:** Pengaruh usia menunjukkan pola berbentuk U, di mana perempuan berusia 19-48 tahun cenderung lebih berdaya. Namun, setelah melewati usia 48 tahun, tingkat pemberdayaan mereka menurun, mungkin terkait dengan penurunan kemampuan fisik dan keterlibatan mereka dalam pekerjaan pertanian.
- **Akses ke Pelatihan dan Tabungan:** Pelatihan keuangan dan akses ke tabungan memiliki pengaruh positif, meskipun sebagian besar perempuan masih menabung di rumah tanpa akses ke lembaga keuangan formal. Program pelatihan yang lebih luas dan akses ke tabungan yang terorganisir dapat meningkatkan pemberdayaan mereka.

2. Karakter Rumah Tangga

- **Kepemilikan Rumah:** Perempuan yang memiliki rumah sendiri

memiliki tingkat pemberdayaan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak memiliki rumah. Kepemilikan rumah memberikan keamanan ekonomi dan sosial yang membantu perempuan merasa lebih berdaya dalam pengambilan keputusan terkait pertanian.

- **Jumlah Anak dan Tanggungan Keluarga:** Menariknya, semakin banyak jumlah anak dan tanggungan keluarga, semakin tinggi tingkat pemberdayaan perempuan. Hal ini mungkin karena perempuan merasa termotivasi untuk lebih berdaya guna mendukung keluarga besar mereka.



V. REKOMENDASI KEBIJAKAN

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Kegiatan	Kementerian/ Lembaga
1	Relatif rendahnya pendapatan petani perempuan dari hasil pertanian.	Program Peningkatan Pendapatan Petani Perempuan	<p>Pelatihan Teknologi Pertanian yang Ramah Terhadap Perempuan: Memberikan bantuan dan pelatihan kepada petani perempuan untuk bisa menggunakan teknologi untuk mempermudah mereka dalam menjalankan aktivitas pertanian di segala kondisi musim, baik yang di pekarangan rumah maupun sawah atau ladang yang luas.</p> <p>Pelatihan Pembuatan Bibit dan Pupuk: Memberikan bantuan bibit dan pupuk untuk petani perempuan baik yang menanam di pekarangan rumah maupun di sawah/ladang. Memberikan pelatihan pembuatan bibit dan pupuk secara mandiri untuk mengantisipasi kelangkaan bibit atau pupuk.</p>	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Kegiatan	Kementerian/ Lembaga
		Pelatihan Teknologi Pasca Panen: Memberikan pelatihan tentang teknologi pengolahan hasil pertanian agar petani perempuan dapat mengolah produk menjadi produk bernilai tambah, seperti pengeringan, fermentasi, atau pengemasan yang lebih baik.	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Inovasi Produk Pertanian: Mendorong diversifikasi produk, seperti pembuatan makanan olahan dari hasil pertanian, untuk meningkatkan nilai jual dan mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah termasuk pemanfaatan aktivitas pertanian untuk program edukasi dan wisata.	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Pariwisata 3. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	
2	Keterbatasan akses pasar bagi mayoritas petani perempuan	Perluasan Akses Pemasaran Digital	Pelatihan Pemasaran Digital: Memberikan pelatihan kepada perempuan petani tentang strategi pemasaran online, penggunaan platform e-commerce seperti Tokopedia/Shopee, serta pemanfaatan media sosial (<i>WhatsApp Business</i> ,	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 3. Kementerian Usaha Mikro Kecil

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Kegiatan	Kementerian/ Lembaga
		Instagram, Facebook, TikTok) untuk promosi produk pertanian.	Sertifikasi dan Komposisi Produk: Mendukung petani perempuan dalam mendapatkan sertifikasi organik, halal, atau sertifikasi lainnya yang diperlukan untuk menarik segmen pasar khusus. Selain itu, membantu mereka dalam pembuatan komposisi dan nilai gizi makanan.	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agama 3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 4. Kementerian Ketenagakerjaan 5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 6. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM)

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Kegiatan	Kementerian/ Lembaga
		<p>Indikasi Geografis (IG): Mengembangkan program untuk mendapatkan tanda pengenal geografis bagi produk-produk khas daerah tertentu, yang dapat menambah nilai produk di pasar domestik dan internasional.</p> <p>Pengembangan Branding Produk: Membantu petani perempuan dalam membangun identitas merek untuk produk mereka, termasuk desain logo, kemasan yang menarik, dan narasi yang kuat mengenai produk mereka.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Perdagangan <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Ekonomi Kreatif (KEK) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian
3	Keterbatasan akses permodalank bagi sebagian besar petani	Perluasan Akses Kredit	<p>Kredit Usaha Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus Perempuan: Memperluas jangkauan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Kegiatan	Kementerian/ Lembaga
	perempuan	kredit UMi untuk perempuan di sektor pertanian sehingga bisa <i>scale up</i> usaha mereka untuk bisa layak mendapatkan KUR. Pelaksanaan kredit UMi dan KUR harus disesuaikan dengan pola bisnis sektor pertanian dan diperkuat dengan program pendampingan nasabah yang optimal untuk meningkatkan kinerja usaha mereka.	Koperasi khusus Perempuan: Membangun koperasi yang dikelola oleh dan untuk perempuan petani, menyediakan akses kredit mikro yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Koperasi ini bisa bekerjasama dengan BUMDes, program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), ataupun lembaga penyiar UMi untuk meningkatkan akses permodalannya yang bisa disalurkan ke anggota.	1. Kementerian Koperasi 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
			Kelompok Usaha Bersama (KUB): Pembentukan kelompok usaha bersama	1. Kementerian Koperasi

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Kegiatan	Kementerian/ Lembaga
		yang terdiri dari perempuan petani untuk mengakses kredit secara kolektif, meningkatkan kekuatan tawar mereka dalam mendapatkan pinjaman dari bank ataupun lembaga keuangan lainnya.		2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
4	Keterbatasan akses terhadap peningkatan kapasitas manajerial dan keuangan.	Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Entrepreneurship	Pelatihan Dasar Perencanaan Keuangan Keluarga : Memberikan pelatihan mengenai pola dasar pengelolaan keuangan kepada seluruh anggota keluarga sehingga bisa merubah pola pikir untuk mencapai kondisi keuangan keluarga yang sehat, termasuk didalamnya mengenai kebiasaan menabung, teknik investasi yang aman dan menguntungkan, serta manajemen utang. Memberikan pelatihan teknik pembukuan baik yang sederhana maupun yang kompleks dengan memanfaatkan aplikasi keuangan yang tersedia di smartphone.	1. Otoritas Jasa Keuangan 2. Kementerian Pertanian 3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 4. Bank Indonesia

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Kegiatan	Kementerian/ Lembaga
		<p>Pelatihan Manajemen Keuangan Usaha: Memberikan pelatihan mengenai tata kelola keuangan usaha baik secara sederhana maupun menggunakan aplikasi digital sehingga bisa menjadi salah satu penguatan untuk mendapatkan akses permodalan yang lebih besar.</p>	<p>Pelatihan Literasi Keuangan: Mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh anggota keluarga mengenai produk keuangan termasuk yang ditujukan bagi petani perempuan, seperti asuransi pertanian, tabungan produktif, dan program kredit mikro baik yang berasal dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya termasuk <i>fintech peer to peer lending</i>. Selain memperkenalkan manfaat produk keuangan, pelatihan juga diarahkan untuk memberikan wawasan mengenai risiko yang dihadapi terutama di era digital.</p>	1. Otoritas Jasa Keuangan 2. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) 3. Bank Indonesia

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Kegiatan	Kementerian/ Lembaga
		<p>Pelatihan entrepreneurship:</p> <p>Memberikan pelatihan dasar-dasar kevirausahaan sehingga petani perempuan bisa memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk berinovasi dan lebih kreatif dalam mengembangkan usaha mereka.</p>	<p>1. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM)</p> <p>2. Kementerian Pertanian</p> <p>3. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)</p> <p>4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)</p> <p>5. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p>	
5	Relatif rendahnya keterlibatan petani	Peningkatan Keterlibatan	Pelatihan Kepemimpinan: Memberikan pelatihan kepemimpinan yang fokus	1. Kementerian Pemberdayaan

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Kegiatan	Kementerian/ Lembaga
	perempuan atas keputusan publik	Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Publik	<p>pada penguatan keterampilan berbicara di depan umum, pengambilan keputusan, dan manajemen organisasi bagi perempuan petani.</p> <p>Program Mentor dan Role Model: Menghubungkan perempuan petani dengan mentor yang berpengalaman dalam pengambilan keputusan publik, memberikan inspirasi dan contohnya keberhasilan perempuan di ruang publik.</p> <p>Kelompok Diskusi Perempuan Petani: Membentuk kelompok diskusi khusus perempuan petani di tingkat desa atau komunitas untuk bertukar ide, berbagi pengalaman, dan melatih keterampilan berbicara di depan umum.</p>	<p>Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)</p> <p>2. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal</p> <p>1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)</p> <p>2. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal</p> <p>1. Kementerian Pertanian</p>

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Kegiatan	Kementerian/ Lembaga
		<p>Partisipasi dalam Organisasi Tani dan Koperasi: Memfasilitasi perempuan petani untuk berperan aktif dalam organisasi tani, koperasi, atau kelompok tani setempat, serta menerapkan kuota kepemimpinan perempuan di organisasi tersebut.</p> <p>Kampanye Kesadaran Publik: Mengadakan kampanye di tingkat komunitas mengenai pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan, termasuk penyuluhan kepada laki-laki untuk mendukung keterlibatan perempuan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pertanian 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) 2. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Agama 	<p>Partisipasi dalam Organisasi Tani dan Koperasi: Memfasilitasi perempuan petani untuk berperan aktif dalam organisasi tani, koperasi, atau kelompok tani setempat, serta menerapkan kuota kepemimpinan perempuan di organisasi tersebut.</p> <p>Kampanye Kesadaran Publik: Mengadakan kampanye di tingkat komunitas mengenai pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan, termasuk penyuluhan kepada laki-laki untuk mendukung keterlibatan perempuan.</p>
		<p>Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam PKK dan Organisasi</p>		<p>Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam PKK dan Organisasi</p>

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Kegiatan	Kementerian/ Lembaga
		Kemasyarakatan. Memberikan sosialisasi kepada perempuan mengenai pentingnya berpartisipasi aktif dalam PKK maupun organisasi kemasyarakatan termasuk seperti Aisyiyah untuk meningkatkan kualitas diri dan keluarga.	<p>Kemasyarakatan. Memberikan sosialisasi kepada perempuan mengenai pentingnya berpartisipasi aktif dalam PKK maupun organisasi kemasyarakatan termasuk seperti Aisyiyah untuk meningkatkan kualitas diri dan keluarga.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Agama 	Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
6	Majoritas pendidikan formal petani perempuan masih rendah.	Program Peningkatan Pendidikan Petani Perempuan	Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C): Mengintegrasikan perempuan petani ke dalam program pendidikan kesetaraan untuk mereka yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, memungkinkan mereka mendapatkan ijazah setara dengan pendidikan formal reguler.	1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Kegiatan	Kementerian/ Lembaga
		<p>Program Pelatihan Vokasi dan Sekolah Pertanian: Membangun atau mendukung sekolah vokasi pertanian yang dirancang khusus untuk perempuan petani, mencakup keterampilan teknis pertanian, pengelolaan usaha tani, agribisnis, dan teknologi pangandian.</p>	<p>1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) 3. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</p>	<p>1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)</p>

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Kegiatan	Kementerian/ Lembaga
		Program Pendidikan Berkelaanjutan (<i>lifelong learning</i>): Mengembangkan program pendidikan berkelanjutan yang menawarkan kesempatan bagi perempuan petani untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka di bidang pertanian modern, pengelolaan keuangan, atau kewirausahaan.	1. Kementerian Pertanian 2. Otoritas Jasa Keuangan 3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	
7	Masih banyak petani perempuan yang berusia di atas usia produktif namun produktif namun dengan tingkat pemberdayaan yang masih rendah.	Program Pemberdayaan Petani Perempuan Usia Tua	Program Pendidikan dan Keterampilan Non-Formal: Menyelenggarakan kursus keterampilan sederhana yang bisa membantu perempuan lansia tetap produktif, seperti membuat produk olahan rumah tangga, kerajinan tangan, atau pengolahan bahan baku pertanian menjadi produk bernilai tambah.	1. Kementerian Sosial 2. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tinggi: 3. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 4. Kementerian Pertanian

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Kegiatan	Kementerian/ Lembaga
		Program Pensiun dan Jaminan Sosial untuk Petani Usia Tua: Mempertimbangkan program pensiun atau jaminan sosial khusus untuk petani perempuan usia tua, serta menyediakan akses ke asuransi pertanian yang ramah lansia.	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2. Kementerian Sosial 3. Kementerian Keuangan	
8	Masih kurangnya ketersediaan data petani perempuan yang	Program Penguatan Integrasi data administrasi petani	Pelayanan penggantian status pekerjaan di KTP bagi petani perempuan: menyediakan program	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Kegiatan	Kementerian/ Lembaga
	terintegrasi.	perempuan	mobil keliling untuk penggantian data administrasi (KTP) bagi petani perempuan.	Pertanian

Penguatan program integrasi data base SIMLUHTAN sebagai dasar pembuatan program kebijakan:
 Memperkuat integrasi data petani perempuan dan kelompok tani yang dapat digunakan sebagai basis data dalam pengembangan kebijakan di sektor pertanian dan kebijakan bagi keluarga petani.

Appendix

Appendix 1. Jenis Variabel

Variabel	Keterangan
BPJS (1 = mempunyai BPJS; 0=lainnya)	Variabel dependen
PKH (1 = mendapat PKH; 0=lainnya)	Variabel dependen
BPNT (1 = mendapat BPNT; 0=lainnya)	Variabel dependen
Masalah administrasi (1=mengalami masalah administrasi; 0=lainnya)	Variabel dependen
Indeks Ketidakberdayaan (cik)	Variabel Endogen
Karakteristik Responden (KR)	
Keanggotaan di 'Aisyiyah (1=binaan 'Aisyiyah; 0=lainnya)	Variabel instrumental
Pendidikan dasar (1=Pendidikan terakhir adalah SD; 0=lainnya)	Variabel instrumental
Pendidikan menengah (1=Pendidikan terakhir adalah SMP/SMA; 0=lainnya)	Variabel instrumental
Pendidikan Tinggi (1=Pendidikan terakhir adalah perguruan 0=lainnya)	Variabel instrumental
Status Perkawinan (1=menikah; 0=lainnya)	Variabel instrumental
Status sebagai kepala rumah tangga (1=perempuan sebagai kepala rumah tangga; 0=lainnya)	Variabel instrumental
Umur	Variabel instrumental
Status di Pertanian (Buruh=1; Lainnya=0)	Variabel instrumental
Keikutsertaan dalam pelatihan (1=mengikuti pelatihan; 0=lainnya)	Variabel instrumental
Keaktifan menabung (1=menabung; 0=lainnya)	Variabel instrumental
Keanggotaan PKK (1=anggota PKK; 0=lainnya)	Variabel instrumental
Karakteristik Rumah Tangga (KRT)	
Kepemilikan rumah (1=miliki sendiri; 0=lainnya)	Variabel instrumental
Jumlah anak	Variabel instrumental
Jumlah tanggungan	Variabel instrumental

Appendix 2. Hasil Estimasi Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Terhadap Akses Bantuan Pemerintah - BPJS

	All Samples	Probolinggo	Garut	Kolaka	Lahat
	bpjs	bpjs	bpjs	bpjs	bpjs
Indeks Ketidakberdayaan	-5.615*** (0.234)	-1.917** (0.956)	-4.102*** (1.063)	-2.055 (1.594)	-0.985 (2.390)
_cons	1.810*** (0.0480)	1.013*** (0.238)	1.418*** (0.269)	1.656*** (0.351)	1.480*** (0.507)
First stage					
Indeks Ketidakberdayaan					
Keanggotaan Aisyiyah	-0.00940* (0.00547)	-0.0594*** (0.0161)	-0.00464 (0.0171)	-0.000998 (0.0193)	-0.0371** (0.0171)
1.Pendidikan dasar	0.0000723 (0.00623)	-0.0225 (0.0204)	0.00511 (0.0287)	0.00481 (0.0264)	0.00495 (0.0266)
2.Pendidikan menengah	-0.0200* (0.00980)	-0.0931*** (0.0339)	-0.0695* (0.0356)	-0.0400 (0.0322)	-0.00220 (0.0315)
3.Pendidikan tinggi	-0.0422* (0.0179)	-0.0233 (0.0606)	-0.0601 (0.0550)	-0.136*** (0.0455)	-0.0362 (0.0645)
Status perkawinan	-0.00746 (0.0132)	0.0339 (0.0398)	-0.0627 (0.0574)	0.0453 (0.0812)	-0.0236 (0.0536)
Status sebagai kepala rumah tangga	-0.00921 (0.0137)	-0.00951 (0.0402)	-0.0307 (0.0598)	0.0178 (0.0804)	-0.0495 (0.0575)
umur	-0.00159 (0.00141)	-0.0130*** (0.00426)	-0.00641 (0.00430)	-0.00105 (0.00566)	-0.0122** (0.00592)
umur2	0.0000161 (0.0000144)	0.000144*** (0.0000411)	0.0000593 (0.0000450)	0.0000136 (0.0000607)	0.000120** (0.0000611)
1.suami_bekerja	0.00354 (0.0152)	0.0149 (0.0843)	-0.00817 (0.0358)	-0.132* (0.0766)	-0.0877 (0.0821)
Pendidikan suami_dasa	-0.00976	0.0130	-0.0204	-0.0488*	-0.0126

	(0.00651)	(0.0209)	(0.0280)	(0.0269)	(0.0293)
Pendidikan suami_menengah	0.00265	0.0493*	-0.0194	-0.0519	-0.0169
	(0.00729)	(0.0286)	(0.0312)	(0.0335)	(0.0303)
Pendidikan suami_tinggi	-0.0354*	-0.0334	-0.0578	-0.0146	0.0443
	(0.0158)	(0.0479)	(0.0514)	(0.0475)	(0.0651)
Status buruh	0.0118	0.0936***	-0.0120	0.0756**	0.0619
	(0.00720)	(0.0168)	(0.0175)	(0.0323)	(0.0405)
Kepemilikan rumah	-0.00680	-0.0725**	-0.0102	-0.0808**	0.00217
	(0.00919)	(0.0323)	(0.0326)	(0.0339)	(0.0369)
Mengikuti pelatihan	-0.0181*	-0.0817*	0.00192	0.0104	0.130***
	(0.00902)	(0.0453)	(0.0310)	(0.0346)	(0.0270)
Memiliki tabungan	0.00246	-0.00838	0.0361**	-0.00866	0.0162
	(0.00424)	(0.0145)	(0.0161)	(0.0177)	(0.0171)
Menjadi anggota PKK	-0.0150**	-0.00781	-0.0185	-0.0258	-0.00828
	(0.00582)	(0.0228)	(0.0247)	(0.0206)	(0.0177)
Jumlah anak	-0.00139	-0.00316	-0.0189***	0.0219***	-0.00382
	(0.00172)	(0.00870)	(0.00511)	(0.00830)	(0.00829)
Jumlah tanggungan	-0.00382*	-0.00437	0.00564	-0.0129*	-0.0199***
	(0.00176)	(0.00566)	(0.00606)	(0.00719)	(0.00765)
_cons	0.352***	0.584***	0.564***	0.516***	0.713***
	(0.0452)	(0.152)	(0.109)	(0.151)	(0.160)
Kab FE	YES				
N	1400	400	300	400	300

Standard errors in
parentheses

* p<0.10	** p<0.05	** p<0.01	*** p<0.001"		
----------	-----------	-----------	--------------	--	--

Appendix 3. Hasil Estimasi Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Terhadap Akses Bantuan Pemerintah – PKH

	All Samples	Probolinggo	Garut	Kolaka	Lahat
	PKH	PKH	PKH	PKH	PKH
cik	5.804*** (0.342)	3.599*** (0.799)	-3.614 (2.342)	5.209*** (0.314)	-2.294 (2.803)
_cons	-1.746*** (0.0451)	-1.405*** (0.197)	0.402 (0.774)	-1.719*** (0.0903)	0.216 (0.755)
First stage					
cik					
Keanggotaan Aisyiyah	-0.00315 (0.00605)	-0.0380** (0.0167)	-0.0142 (0.0200)	0.00571 (0.0107)	-0.0342** (0.0163)
1.Pendidikan dasar	0.00193 (0.00578)	-0.0272 (0.0193)	0.0385 (0.0313)	0.0163 (0.0146)	0.000301 (0.0257)
2.Pendidikan menengah	-0.00787 (0.0103)	-0.107*** (0.0325)	-0.0199 (0.0458)	-0.0216 (0.0182)	-0.0292 (0.0353)
3.Pendidikan tinggi	-0.0465 (0.0239)	-0.0632 (0.0588)	0.0256 (0.0580)	-0.0916*** (0.0332)	-0.0212 (0.0639)
Status perkawinan	0.0167 (0.0144)	0.0414 (0.0380)	-0.0379 (0.0705)	0.0671 (0.0538)	-0.0409 (0.0514)
Status sebagai kepala rumah tangga	0.0285 (0.0169)	0.0172 (0.0387)	-0.0277 (0.0674)	0.0781 (0.0536)	-0.0690 (0.0553)
umur	-0.000705 (0.00175)	-0.0119*** (0.00416)	-0.00957** (0.00456)	-0.00400 (0.00322)	-0.0154*** (0.00470)
umur2	0.00000886 (0.0000183)	0.000127*** (0.0000407)	0.0000961** (0.0000475)	0.0000466 (0.0000347)	0.000149*** (0.0000490)
1.suami_bekerja	-0.0105 (0.0170)	0.0238 (0.0799)	-0.0271 (0.0391)	-0.0764* (0.0439)	-0.0833 (0.0799)

Pendidikan suami_dasar	-0.00271	0.0149	-0.0170	-0.0231	-0.0150
	(0.00616)	(0.0200)	(0.0319)	(0.0158)	(0.0272)
Pendidikan suami_menengah	-0.0200	0.0250	-0.00659	-0.0472**	-0.00644
	(0.0114)	(0.0280)	(0.0354)	(0.0194)	(0.0303)
Pendidikan suami_tinggi	-0.0483*	-0.0398	-0.0483	-0.0311	0.0599
	(0.0197)	(0.0463)	(0.0625)	(0.0284)	(0.0619)
Status buruh	0.0223	0.106***	-0.0138	0.0180	0.0397
	(0.0148)	(0.0153)	(0.0197)	(0.0197)	(0.0471)
Kepemilikan rumah	-0.00762	-0.0713**	-0.0151	-0.0144	-0.00389
	(0.0108)	(0.0308)	(0.0414)	(0.0213)	(0.0360)
Mengikuti pelatihan	0.00622	-0.136***	-0.0124	-0.0280	0.0971*
	(0.00894)	(0.0424)	(0.0362)	(0.0194)	(0.0542)
Memiliki tabungan	-0.00171	0.000753	0.0356*	-0.0191*	0.0120
	(0.00379)	(0.0139)	(0.0182)	(0.0102)	(0.0177)
Menjadi anggota PKK	0.00113	0.00747	-0.00946	0.0120	0.00619
	(0.00475)	(0.0212)	(0.0269)	(0.0112)	(0.0210)
Jumlah anak	0.00395*	-0.000653	-0.0194***	0.0150***	-0.00216
	(0.00196)	(0.00838)	(0.00536)	(0.00563)	(0.00827)
Jumlah tanggungan	0.00318	0.00453	-0.00166	-0.00255	-0.0201***
	(0.00164)	(0.00505)	(0.00779)	(0.00425)	(0.00669)
_cons	0.267***	0.514***	0.614***	0.392***	0.813***
	(0.0469)	(0.149)	(0.117)	(0.0952)	(0.138)
Kab FE	YES				
N	1400	400	300	400	300
Standard errors in parentheses					
* p<0.10	** p<0.05	** p<0.01	*** p<0.001"		

Appendix 4. Hasil Estimasi Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Terhadap Akses Bantuan Pemerintah – BPNT

	All Samples	Probolinggo	Garut	Kolaka	Lahat
	BPNT	BPNT	BPNT	BPNT	BPNT
cik	5.047*** (0.404)	4.067*** (0.670)	-5.728*** (1.376)	4.392*** (0.494)	-2.110 (1.744)
_cons	-1.598*** (0.0834)	-1.345*** (0.175)	1.442*** (0.489)	-1.541*** (0.117)	0.0631 (0.487)
First stage					
cik					
Keanggotaan Aisyiyah	-0.0163* (0.00729)	-0.0362** (0.0158)	0.0102 (0.0119)	0.0147 (0.0127)	-0.0240 (0.0176)
1.Pendidikan dasar	-0.00946 (0.00896)	-0.0369** (0.0184)	0.0204 (0.0245)	0.0191 (0.0174)	0.0199 (0.0263)
2.Pendidikan menengah	-0.0374** (0.0126)	-0.117*** (0.0311)	-0.00380 (0.0291)	-0.0216 (0.0212)	0.00186 (0.0292)
3.Pendidikan tinggi	-0.0710*** (0.0215)	-0.0865 (0.0568)	0.0131 (0.0369)	-0.101*** (0.0361)	-0.0231 (0.0617)
Status perkawinan	0.0303 (0.0195)	0.0487 (0.0362)	-0.0186 (0.0493)	0.101* (0.0599)	-0.0401 (0.0505)
Status sebagai kepala rumah tangga	0.0274 (0.0200)	0.0141 (0.0366)	-0.0185 (0.0464)	0.0745 (0.0595)	-0.0683 (0.0543)
umur	-0.00462* (0.00203)	-0.0110*** (0.00402)	-0.00422 (0.00463)	-0.00208 (0.00377)	-0.0121** (0.00504)
umur2	0.0000524* (0.0000210)	0.000121*** (0.0000392)	0.0000311 (0.0000445)	0.0000184 (0.0000406)	0.000114** (0.0000533)
1.suami_bekerja	-0.0236 (0.0224)	0.00390 (0.0737)	-0.00662 (0.0275)	-0.0830 (0.0511)	-0.115 (0.0787)

Pendidikan suami_dasar	0.00213	0.0209	-0.0124	-0.0319*	-0.0181
	(0.00894)	(0.0191)	(0.0199)	(0.0186)	(0.0269)
Pendidikan suami_menengah	-0.0284**	0.0248	0.0180	-0.0795***	-0.0126
	(0.0109)	(0.0266)	(0.0219)	(0.0225)	(0.0286)
Pendidikan suami_tinggi	-0.0456*	-0.0274	0.00386	-0.0388	0.0718
	(0.0193)	(0.0437)	(0.0442)	(0.0327)	(0.0620)
Status buruh	0.0456***	0.101***	-0.0266	0.0175	0.0520
	(0.0106)	(0.0154)	(0.0191)	(0.0233)	(0.0393)
Kepemilikan rumah	-0.0227	-0.0643**	-0.00544	-0.0379	0.00248
	(0.0131)	(0.0297)	(0.0272)	(0.0250)	(0.0340)
Mengikuti pelatihan	0.00983	-0.143***	-0.0112	-0.00749	0.106***
	(0.0120)	(0.0413)	(0.0214)	(0.0218)	(0.0343)
Memiliki tabungan	0.00133	0.00376	0.0138	-0.0101	0.0220
	(0.00597)	(0.0133)	(0.0207)	(0.0117)	(0.0160)
Menjadi anggota PKK	0.00226	0.0130	0.00328	-0.00376	-0.00292
	(0.00740)	(0.0203)	(0.0173)	(0.0134)	(0.0168)
Jumlah anak	0.00334	-0.000972	-0.00838	0.0186***	-0.00443
	(0.00245)	(0.00792)	(0.00933)	(0.00636)	(0.00763)
Jumlah tanggungan	0.00213	0.00405	-0.00604	-0.00740	-0.0200***
	(0.00227)	(0.00479)	(0.00418)	(0.00514)	(0.00664)
_cons	0.375***	0.499***	0.461**	0.377***	0.752***
	(0.0607)	(0.140)	(0.179)	(0.107)	(0.141)
Kab FE	YES				
N	1400	400	300	400	300
Standard errors in parentheses					
* p<0.10	** p<0.05	** p<0.01	*** p<0.001"		

Appendix 5. Hasil Estimasi Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Terhadap Permasalahan Administrasi

	All Samples	Probolinggo	Garut	Kolaka	Lahat
	admin_proble m	admin_proble m	admin_proble m	admin_proble m	admin_proble m
cik	6.040*** (0.117)	-0.513 (1.232)	-6.547 (6.407)	-2.606 (2.191)	6.106*** (0.457)
_cons	-1.514*** (0.0567)	0.898*** (0.325)	5.163** (2.114)	2.018*** (0.263)	-1.536*** (0.118)
First stage					
cik					
Keanggotaan Aisyiyah	-0.0163* (0.00729)	-0.0541*** (0.0168)	-0.0234 (0.0184)	0.0127 (0.0235)	-0.0117 (0.00915)
1.Pendidikan dasa	-0.00946 (0.00896)	-0.0265 (0.0213)	0.0259 (0.0323)	0.0129 (0.0254)	0.00389 (0.0128)
2.Pendidikan menengah	-0.0374** (0.0126)	-0.0937*** (0.0353)	-0.0427 (0.0412)	-0.0162 (0.0322)	-0.0125 (0.0148)
3.Pendidikan tinggi	-0.0710*** (0.0215)	-0.0300 (0.0637)	0.00842 (0.0598)	-0.105* (0.0543)	0.0637 (0.0392)
Status perkawinan	0.0303 (0.0195)	0.0257 (0.0415)	-0.0697 (0.0662)	0.00229 (0.0920)	-0.00448 (0.0244)
Status sebagai kepala rumah tangga	0.0274 (0.0200)	-0.00592 (0.0419)	-0.0457 (0.0692)	-0.0160 (0.0852)	-0.0135 (0.0271)
umur	-0.00462* (0.00203)	-0.0134*** (0.00466)	-0.00804* (0.00480)	0.0000816 (0.00577)	-0.00853** (0.00370)
umur2	0.0000524* (0.0000210)	0.000147*** (0.0000439)	0.0000813 (0.0000501)	0.00000479 (0.0000607)	0.0000704** (0.0000353)
1.suami_bekerja	-0.0236 (0.0224)	-0.0165 (0.0874)	-0.0330 (0.0406)	-0.124 (0.0805)	0.00505 (0.0426)

Pendidikan suami_dasar	0.00213	0.0101	-0.00444	-0.0466	-0.0232
	(0.00894)	(0.0226)	(0.0323)	(0.0284)	(0.0142)
Pendidikan suami_menengah	-0.0284**	0.0370	-0.0168	-0.0536	-0.0273*
	(0.0109)	(0.0306)	(0.0360)	(0.0345)	(0.0157)
Pendidikan suami_tinggi	-0.0456*	-0.0160	-0.0780	-0.0108	-0.0197
	(0.0193)	(0.0494)	(0.0570)	(0.0458)	(0.0337)
Status buruh	0.0456***	0.102***	-0.0187	0.0857***	0.0144
	(0.0106)	(0.0160)	(0.0199)	(0.0308)	(0.0201)
Kepemilikan rumah	-0.0227	-0.0798**	-0.0390	-0.0539	0.00706
	(0.0131)	(0.0336)	(0.0360)	(0.0416)	(0.0166)
Mengikuti pelatihan	0.00983	-0.113**	0.00315	-0.0254	0.0390*
	(0.0120)	(0.0441)	(0.0359)	(0.0351)	(0.0222)
Memiliki tabungan	0.00133	-0.00811	0.0387**	-0.0135	0.00968
	(0.00597)	(0.0169)	(0.0182)	(0.0168)	(0.00843)
Menjadi anggota PKK	0.00226	0.00679	-0.00469	-0.0438	0.00740
	(0.00740)	(0.0232)	(0.0285)	(0.0272)	(0.00824)
Jumlah anak	0.00334	-0.00665	-0.0179***	0.0180*	-0.0134***
	(0.00245)	(0.00905)	(0.00562)	(0.0103)	(0.00485)
Jumlah tanggungan	0.00213	0.00157	0.00315	-0.0100	-0.00328
	(0.00227)	(0.00558)	(0.00703)	(0.00804)	(0.00393)
_cons	0.375***	0.628***	0.625***	0.486***	0.521***
	(0.0607)	(0.165)	(0.115)	(0.161)	(0.120)
Kab FE	YES				
N	1400	400	300	400	300

Standard errors in parentheses

* p<0.10	* p<0.05	** p<0.01	*** p<0.001"		
----------	----------	-----------	--------------	--	--

Appendix 6. Hasil Estimasi Determinan Pemberdayaan Perempuan

	All Samples	Probolinggo	Garut	Kolaka	Lahat
	cik				
Keanggotaan Aisyiyah	-0.0312*** (0.00927)	-0.0535*** (0.0190)	-0.0232 (0.0200)	-0.00568 (0.0173)	-0.0341** (0.0173)
1.Pendidikan dasar	0.00213 (0.0135)	-0.0277 (0.0217)	0.0256 (0.0334)	0.00824 (0.0278)	0.00431 (0.0278)
2.Pendidikan menengah	-0.0391** (0.0172)	-0.0956*** (0.0361)	-0.0433 (0.0425)	-0.0290 (0.0331)	-0.00690 (0.0317)
3.Pendidikan tinggi	-0.0771*** (0.0277)	-0.0358 (0.0644)	0.00804 (0.0619)	-0.132*** (0.0478)	-0.0335 (0.0671)
Status perkawinan	0.00713 (0.0287)	0.0273 (0.0426)	-0.0699 (0.0685)	0.0587 (0.0844)	-0.0273 (0.0554)
Status sebagai kepala rumah tangga	0.00408 (0.0296)	-0.00720 (0.0431)	-0.0449 (0.0716)	0.0271 (0.0843)	-0.0519 (0.0598)
umur	-0.0100*** (0.00244)	-0.0142*** (0.00445)	-0.00805 (0.00497)	-0.00236 (0.00585)	-0.0139*** (0.00512)
umur2	0.000103*** (0.0000252)	0.000153*** (0.0000430)	0.0000810 (0.0000519)	0.0000258 (0.0000631)	0.000138*** (0.0000531)
1.suami_bekerja	-0.0631** (0.0318)	-0.0233 (0.0888)	-0.0336 (0.0419)	-0.154** (0.0762)	-0.0915 (0.0851)
Pendidikan suami_dasar	-0.0161 (0.0132)	0.0130 (0.0225)	-0.00456 (0.0334)	-0.0550** (0.0273)	-0.00741 (0.0291)
Pendidikan suami_menengah	-0.0176	0.0405	-0.0167	-0.0682**	-0.0146

	(0.0157)	(0.0307)	(0.0373)	(0.0308)	(0.0314)
Pendidikan suami_tinggi	-0.0233	-0.0119	-0.0780	-0.00767	0.0505
	(0.0269)	(0.0502)	(0.0590)	(0.0497)	(0.0667)
Status buruh	0.0555***	0.102***	-0.0186	0.0702**	0.0605
	(0.0119)	(0.0163)	(0.0206)	(0.0343)	(0.0423)
Kepemilikan rumah	-0.0441**	-0.0830**	-0.0391	-0.0783**	0.00723
	(0.0179)	(0.0339)	(0.0372)	(0.0358)	(0.0373)
Mengikuti pelatihan	-0.0198	-0.113**	0.00350	-0.00652	-0.131***
	(0.0175)	(0.0454)	(0.0372)	(0.0337)	(0.0277)
Memiliki tabungan	-0.00631	-0.00415	-0.0381**	-0.0127	0.0177
	(0.00881)	(0.0155)	(0.0186)	(0.0184)	(0.0176)
Menjadi anggota PKK	-0.00339	0.00535	-0.00453	-0.0174	-0.00675
	(0.0109)	(0.0237)	(0.0294)	(0.0208)	(0.0183)
Jumlah anak	-0.00159	-0.00749	-0.0178***	0.0242***	-0.00487
	(0.00368)	(0.00915)	(0.00581)	(0.00818)	(0.00840)
Jumlah tanggungan	-0.00315	0.000954	0.00299	-0.0136*	-0.0179**
	(0.00336)	(0.00561)	(0.00722)	(0.00747)	(0.00731)
Kab FE	Yes				
N	1400	400	300	400	300
Standard errors in parentheses					
* p<0.10		** p<0.05	*** p<0.01"		

Halaman ini sengaja dikosongkan

